

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sesuai dengan visi RPJMD 2016-2021, salah satu indikator kinerja utama dalam misi ke-2 adalah meningkatnya indeks reformasi birokrasi dan indeks kepuasan masyarakat. Indeks ini akan meningkat apabila proses penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik benar-benar mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi. Meningkatnya indeks itu antara lain ditandai dengan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya mengimplementasikan sistem penopang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, pemenuhan hak publik akan informasi pemerintahan juga menjadi salah satu aspek dari kepuasan masyarakat terhadap kinerja Daerah.

Dalam konteks itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika pada tahun 2016 yang sebagian besar dilaksanakan oleh Bagian Komunikasi dan Telematika) dituangkan ke dalam dua program utama. Program tersebut adalah Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa serta program kerjasama informasi dengan media massa. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa mencakup domain komunikasi dan diseminasi informasi telematika maupun komunikasi media massa, sedangkan program kerjasama informasi media massa dilakukan melalui kerjasama Pemkab dengan media massa nasional/regional/lokal.

a. Program dan Kegiatan

Alokasi belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2016 berjumlah total Rp 1.310.000.000, dan setelah perhitungan APBD terealisasi sebesar Rp 1.163.127.180 atau mencapai 91,08%.

Belanja urusan komunikasi dan informatika bisa diuraikan pada tabel berikut:

Tabel IV.C.10.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	1.310.000.000	1.163.127.180
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.080.000.000	963.627.180
	Program Kerjasama Informasi dan Media	230.000.000	229.499.998
B	Belanja Tidak langsung	-	-
1	Belanja Pegawai	-	-
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	-
3	Belanja Tak Terduga	-	-
	Jumlah total	1.310.000.000	1.163.127.180

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2016(diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan utama pada program ini antara lain adalah Penyediaan Media Sosialisasi Pembangunan Daerah, yang diwujudkan melalui pemeliharaan papan informasi di alun-alun Wonosobo, pembuatan aplikasi E-Majalah serta papan baliho untuk diseminasi informasi publik. Papan informasi ini tidak hanya bermanfaat sebagai media untuk menyampaikan informasi publik, namun juga menampung aspirasi dan apresiasi terhadap gagasan warga.

Kegiatan lainnya adalah pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Informasi Masyarakat, dalam bentuk jambore pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) serta kelompok informasi masyarakat (KIM). Kegiatan ini melibatkan PPID dari 39 OPD serta 15 KIM. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas PPID dan KIM agar lebih kreatif dan memiliki determinasi untuk melakukan transformasi dan penguatan proses penyebaran/pengelolaan informasi.

Selain kegiatan tersebut, pada program ini juga dilaksanakan kegiatan yang bersifat rutin tahunan yaitu Fasilitasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM. Meskipun era media sosial telah menjadi fenomena, LPPD Radio Pesona FM tetap memiliki arti penting sebagai salah satu media pemerintah dalam melakukan komunikasi dan diseminasi informasi publik.

Selanjutnya, pada ranah komunikasi telematika, penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika juga berupaya untuk mendorong penerapan e-government Wonosobo. Untuk mendorong penerapan teknologi informasi dan komunikasi Pemkab Wonosobo, melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas pengelolaan e-government dilakukan penyediaan bandwidth untuk Data Center (DC) yang menopang aplikasi dan jaringan internet/intranet Pemkab. Kegiatan ini sebagian besar berwujud pengadaan sarpras, dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan PT Telkom, Indonesia, PT. Bhinneka Mentari Dimensi, CV. Bavaria Infotech Utama, CV. Armada Komputer.

Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, melalui urusan Komunikasi dan informatika juga dilakukan beberapa fasilitasi kegiatan untuk mendukung program/urusan lainnya, seperti:

- Sosialisasi dan diseminasi tentang Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan *leaflet* dan poster.
- Supporting untuk publikasi informasi tentang event Hari Jadi Wonosobo, dalam bentuk cetak baliho dan spanduk.
- Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik berupa pengadaan LCD Proyektor, Layar LCD, Kamera SLR, Lensa Zoom SLR, Aksesoris Kamera
- Pelatihan Ketrampilan Penyiaran Radio untuk meningkatkan kualitas penyiaran radio FM se-Kabupaten Wonosobo, baik kualitas penyiar maupun konten siarannya.
- Kemitraan dengan media Taman Plasa, dalam bentuk publikasi tentang potensi UMKM Kabupaten Wonosobo di media lokal Taman Plasa.

- Bintel Jurnalistik untuk perangkat desa, untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik perangkat desa dalam rangka promosi dan partisipasi publik dalam pembangunan
- Pengadaan perlengkapan press room, berupa pengadaan sarpras untuk ruang pers, melibatkan Komunitas Jurnalis Wonosobo

2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Program ini mencakup kegiatan kerjasama diseminasi informasi program pemerintah kepada masyarakat dengan media Wonosobo Ekspres, Suara Merdeka, Jawa Pos, Tempo, dalam bentuk liputan khusus/rubrik sebagai berikut:

- Kolom Khusus Potensi Pariwisata Wonosobo
- Kolom Khusus Info Pembangunan Wonosobo
- Kolom Khusus Seputar kebijakan dan program Pemkab
- Kolom khusus info hasil Pembangunan
- Kolom khusus info program kebijakan khusus Pemkab
- Kolom Khusus ILPPD
- Kolom khusus info seputar hari jadi

Selain itu, pada program ini juga dilaksanakan kegiatan Komunikasi pada event pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan RAPI dan ORARI. Bentuk kegiatan adalah peningkatan kapasitas anggota RAPI dan ORARI, serta pengadaan peralatan pendukung kemitraan pemerintah daerah dengan kedua lembaga tersebut

c. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi Pemerintah maka harus dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan sumber daya yang dikelola dan dokumen perencanaan yang disusun. Pengukuran kinerja tersebut berupa capaian kinerja berdasarkan indikator EKPPD tahun 2016 serta RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel IV.C.10.2
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Website milik pemerintah daerah	ada	ada
2	Pameran/expo	1	10

Sumber: Dinas Kominfo, 2017 (diolah)

Dari hasil penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika tahun 2016, sudah tersedia aplikasi untuk mendukung pendayagunaan TIK dan E-Government Pemkab Wonosobo sebagai berikut:

- e-BPHTB
- Sistem Informasi kesehatan-SIK (Rumah Sakit)

IV.C.10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan-PATEN
- Carika Praja
- Peta Zona Cell Plan
- e-Presensi
- Retribusi Daerah
- Arsip Sekretariat Dewan
- SIGA
- Sistem Informasi Terintegrasi-SIPD
- Sistem Informasi Perencanaan Daerah-SIPP
- SINTA NADINE
- Sistem Informasi Ketenagakerjaan-SISNAKER
- APRIZ
- Data Pendapatan
- Data SK Berjalan
- Sistem Informasi Kesejahteraan Keluarga
- SIMPUS (Puskesmas)
- SIK (Rumah Sakit)
- SIKD (Keuangan Daerah)
- Sistem Informasi Kepegawaian-SIMPEG
- Sistem Informasi Administrasi Kependudukan-SIAK

Apabila dilihat dari indikator program pada RPJMD 2016-2021, capaian urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2016 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.C.10.3
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016
Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blue print TIK	35%	44,44%
2	Prosentase penerapan tata naskah dinas elektronik	0,025%	0%
3	Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat	Data tidak tersedia (DTT)	14
4	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK	25%	25,32%

Sumber: Dinas Kominfo, 2017 (diolah)

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan umum yang muncul pada penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

- Faktor topografis dan geografis Wonosobo menyebabkan Jaringan WAN (*Wide Area Network*) Kabupaten Wonosobo belum dapat mencapai seluruh kecamatan. Jaringan

yang ada warisan dari jaman SIMPUS sudah dimakan usia. Di sisi lain solusi berbasis tower antar kecamatan berbiaya mahal, di samping tidak terlalu efektif.

- Kondisi Data Center yang belum optimal dari segi hardware dan sarpras pendukung.
- Tingkat pemahaman masyarakat (literasi) dan budaya teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan birokrasi masih perlu ditingkatkan. Ini mempengaruhi kecepatan adaptasi berbagai produk pendayagunaan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- Mencoba menggagas lagi penggunaan tower dalam jaringan cell-plan agar bisa dimanfaatkan oleh Pemkab dalam pendayagunaan TIK khususnya jaringan WAN antar kecamatan
- Seiring perubahan nomenklatur kelembagaan menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika, langkah pertama yang dilakukan adalah merevisi blue print sekaligus melakukan revitalisasi jaringan berbasis teknologi paling mutakhir termasuk fiber optic, dan selanjutnya merevitalisasi Data Center.
- Mendorong intervensi kelembagaan dan ketatalaksanaan agar bisnis proses birokrasi beralih ke sebanyak mungkin instrumen berbasis TIK. Selain lebih efisien, ini juga selaras dengan perkembangan jaman dan arahan dari Pusat tentang otomasi dan efisiensi proses birokrasi.